

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Berjanji Permudah Bantuan untuk Daerah Penyangga

Dana untuk daerah tetangga dijanjikan akan cair pada awal tahun.

Devv Ernls

devv.ernls@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji mencari solusi agar bantuan dana untuk daerah penyangga bisa cair pada awal tahun. Selama ini, bantuan dana untuk daerah di sekitar Jakarta biasanya baru cair pada pertengahan tahun.

"Datangnya (dana) di tengah atau di ujung (tahun). Ini harus kita coba cari solusinya," ujar Anies selepas rapat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) di Balai Kota Jakarta kemarin.

Lantaran terlambat mengucur, menurut Anies, semua ini bantuan DKI untuk daerah penyangga kerap tidak terserap pada tahun anggaran yang sama. Pada akhir tahun, bantuan

keuangan itu masuk ke sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Anies tak mau hal itu terulang. Dia ingin urusan administrasi tak menjadi hambatan dalam pencairan dana. "Problema-problema administratif teknis jangan sampai menjadi penghalang," ujar Anies, tanpa menjolaskan lebih rinci bagaimana cara mempercepat pencairan dana tersebut.

Pernyataan Anies itu menjawab keluhan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam rapat BKSP Jabodetabekjur. "Ini masalah bagi Pak Gubernur. Sering kali terjadi Silpa," ujar dia. Bila bantuan dana cair pada awal tahun, menurut Airin, daerah penyangga Ibu Kota bisa menyelesaikan program yang telah direncanakan.

Rapat BKSP Jabodeta-

bekjur kemarin membahas sejumlah hal, di antaranya penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih. Para kepala daerah yang menghadiri rapat sepakat menyelaraskan pembangunan di kawasan Jabodetabekjur.

Anies berharap hasil rapat BKSP Jabodetabekjur tidak menguap tanpa ada langkah konkret. "Mohon maaf, BKSP ini terkadang hanya notulensi yang akhirnya tidak berjalan," ujar dia.

Selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur, Anies berjanji menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat kemarin. "Kita tidak usah mendefinisikan ke belakang. Selanjutnya, ke depan yang akan kita bicarakan," ujar dia.

Kepala Sub-Bagian Kerja Sama Perkotaan Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Tony Depriyana, mengatakan masalah daerah bantuan untuk daerah penyangga tak melulu soal keterlambatan pencairan dana. Perencanaan program

oleh daerah penyangga juga kadang belum matang.

Tony memunculkan, pada 2017, Pemerintah Kota Tangerang mengajukan bantuan ke DKI untuk normalisasi Situ Cipondoh sebesar Rp 10 miliar. Namun, di tengah jalan, Tangerang mengubah program tersebut lantaran ada kendala teknis dan perencanaan yang belum rampung. "Itu enggak bisa tiba-tiba diganti," kata dia. "Setiap program kan harus melewati tahapan evaluasi."

Pemerintah DKI, menurut Tony, selanjutnya akan mendorong daerah penyangga agar merencanakan program secara lebih matang serta melengkapi semua dokumen permohonan bantuan. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Berjanji Permudah Bantuan untuk Daerah Penyangga

Jabodetabekjur Berfokus pada Lima Isu

JAKARTA – Rapat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) memutuskan untuk berfokus pada lima isu masalah. Kelima isu itu adalah penanggulangan banjir, transportasi, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan ketahanan pangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, selama dua pekan ke depan, sejumlah program akan ditelurkan dari lima isu masalah tersebut. Kami masing-masing kirim tim untuk menyusun langkah-langkah operasional,” ujar Anies di Balai Kota.

Bupati Bogor Nurhayati mengatakan satu program dalam menanggulangi masalah banjir yaitu melalui reboisasi. Hutan-hutan di kawasan Puncak dilakui gunduli karena maraknya vila-vila liar. Akibatnya, kawasan resapan air meripis

dan menimbulkan banjir ke Jakarta.

Dia mengusulkan bantuan dana dari DKI untuk membantu pembongkaran vila-vila liar. “Tapi kami mencoba inventarisasi dulu. Kewenangan pertanahan bukan di kami. Kami hanya masuk dari IMB, kata dia.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan masalah banjir pantas menjadi fokus. Dia mengusulkan program revitalisasi waduk, situ, atau embung, seperti yang sedang dikerjakan dengan Waduk Cimahi dan Waduk Sukarahaji di Kabupaten Bogor.

Selain Iwa dan Nurhayati, rapat BKSP di Balai Kota kemarin diikuti pula oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris, Wakil Bupati Bekasi Eka Supra Atmaja, Wakil Bupati Cianjur Hermeti Suherman, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. ● JENYERNIS

BANTUAN UNTUK TETANGGA

SABAN tahun, pemerintah DKI Jakarta menyediakan dana bantuan bagi daerah penyangga. Jumlahnya berubah-ubah, bergantung pada proposal dan kesepakatan.

APBD 2017		APBD 2018
Rp 5,63 miliar	Kabupaten Bogor	Rp 13,29 miliar
Rp 15 miliar	Kota Tangerang	Rp 10 miliar
Rp 318 miliar	Kota Bekasi	Rp 202,97 miliar
Rp 3 miliar	Kota Depok	Rp 10 miliar
Rp 3 miliar	Kota Tangerang Selatan	Rp 25,59 miliar
Rp 2,34 miliar	Kabupaten Bekasi	Rp 8,11 miliar